



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 376 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia 2020-2024, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 644 Tahun 2020);
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 327 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 264 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini.

KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi program kebijakan, dan kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia.

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ombudsman Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

#

MOKHAMMAD NAJIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Seluruh Koordinator dan Anggota Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tematik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 376 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

TEMATIK DI LINGKUNGAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI LINGKUNGAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan <i>(bottleneck)</i>	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
1	Pengentasan Kemiskinan	Penyelenggaraan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di 34 Provinsi untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa miskin	Jumlah pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	15 (Perwakilan)	Rendahnya sinergi pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Meningkatnya sinergi pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Dokumen hasil pertemuan	10	Terselenggara-nya koordinasi Ombudsman RI dengan Kementerian terkait	Laporan	Laporan hasil koordinasi	1	1	3		5	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama VII	Keasis-tenan Utama VII
									Terselenggara-nya koordinasi Ombudsman RI Pusat	Laporan	Laporan hasil koordinasi		1	1		2	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama VII	Keasis-tenan Utama VII
									Terselenggara-nya koordinasi Ombudsman Perwakilan dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kanwil/Kantor Kemenag	Laporan	Laporan hasil koordinasi	28	28	28		84	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama VII	Ombud-sman Perwaki-lan
					Belum adanya instrumen pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Tersusunnya instrumen pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Ombudsman	Instrumen pengawas-an	2	Terselenggara-nya evaluasi pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kegiatan	Laporan kegaitan evaluasi		1	1		2	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama VII	Ombud-sman Perwaki-lan
									Memformulasi-kan instrumen pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Surat	Surat Edaran Ketua Ombuds-man		1			1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama VII	Keasis-tenan Utama VII

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Diseminasi instrumen pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kegiatan	Kegiatan diseminasi		1			1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama VII	Keasis- tenan Utama VII
					Belum adanya pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berkeadilan di seluruh Indonesia	Terwujudnya pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berkeadilan di seluruh Indonesia	Jumlah kegiatan pengawas-an	77	Terselenggara-nya pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi	Kegiatan	Kegiatan Pengawas-an		28			28	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama VII	Ombud- sman Perwaki- lan
									Terselenggara-nya pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan di lingkungan Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Kegiatan Pengawas-an		28			28	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama VII	Ombud- sman Perwaki- lan
									Terselenggara-nya pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama	Kegiatan	Kegiatan Pengawas-an		21			21	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama VII	Ombud- sman Perwaki- lan

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Terlaksananya kegiatan koordinasi lintas kementerian/ lembaga dalam rangka perbaikan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kegiatan	Kegiatan koordinasi lintas kementerian/ lembaga			3		3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama VII	Keasis- tenan Utama VII
2	Peningkatan Investasi	Pengawasan pelayanan investasi terpadu	Persentase nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi terpadu yang baik	67.30%	Belum adanya pengawasan eksternal pengelolaan investasi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah	Terwujudnya pengawasan eksternal pengelola investasi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah	Terbitnya pedoman penilaian kepatuhan yang menentukan objek penilaian terkait pengelolaan investasi	1	Terlaksananya pengawasan terhadap pengelolaan investasi di pemerintahan daerah secara nasional melalui penilaian kepatuhan	Unit kerja	Jumlah pemerintah daerah yang diawasi			547		547	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi
									Terlaksananya pengawasan terhadap pengelolaan investasi di pemerintahan pusat melalui penilaian kepatuhan	Unit kerja	Jumlah pemerintah pusat yang diawasi			1		1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi
									Terlaksananya pendampingan perbaikan pemenuhan standar pelayanan publik secara nasional	Kegiatan	Jumlah pendam- pingan perbaikan yang dilakukan		34			34	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan <i>(bottleneck)</i>	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
					Belum adanya pengawasan eksternal terkait kompetensi pengelolaan investasi di tingkat pemerintahan daerah	Terwujudnya pengawasan kompetensi petugas pengelola investasi	Jumlah petugas pengelola investasi yang dinilai	1104	Terlaksananya pengawasan terhadap pimpinan pelayanan investasi	Kegiatan	Jumlah pengawa-san pada pimpinan pelayanan			564		564	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama Manaje-men Pencega-han Maladmi-nistrasi	Ombud-sm an Perwaki-lan
									Terlaksananya pengawasan terhadap staf pelayanan investasi	Kegiatan	Jumlah pengawas-an pada staf pelayanan			540		540	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama Manaje-men Pencega-han Maladmi-nistrasi	Ombud-sm an Perwaki-lan
									Terlaksananya pengawasan eksternal terhadap unit pengelola investasi terkait pemenuhan informasi persyaratan	Kegiatan	Jumlah pengawa-san unit (persyara-tan)			439		439	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama Manaje-men Pencega-han Maladmi-nistrasi	Ombud-sm an Perwaki-lan
					Belum terdapat pengawasan eksternal pada unit pengelola investasi terkait pemenuhan standar pelayanan publik	Terwujudnya pengawasan eksternal pada unit pengelola investasi terkait pemenuhan standar pelayanan publik	Jumlah unit pengelola investasi	418	Terlaksananya pengawasan eksternal terhadap unit pengelola investasi terkait pemenuhan informasi mekanisme pelayanan publik	Kegiatan	Jumlah pengawa-san unit (mekanis-me)			434		434	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama Manaje-men Pencega-han Maladmi-nistrasi	Ombud-sm an Perwaki-lan
									Terlaksananya pengawasan eksternal terhadap unit pengelola investasi terkait pemenuhan informasi biaya	Kegiatan	Jumlah pengawa-san unit (biaya)			418		418	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama Manaje-men Pencega-han Maladmi-nistrasi	Ombud-sm an Perwaki-lan

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan <i>(bottleneck)</i>	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Terlaksananya pengawasan eksternal terhadap unit pengelola investasi terkait pemenuhan informasi waktu	Kegiatan	Jumlah pengawa- san unit (waktu)			423		423	Tidak terkait langsung dengan masyara- kat (stake- holder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Ombud- sman Perwaki- lan
									Terlaksananya pengawasan eksternal terhadap unit pengelola investasi terkait pemenuhan informasi sarana prasarana pelayanan	Kegiatan	Jumlah pengawa- san unit (sarana)			469		469	Tidak terkait langsung dengan masyara- kat (stake- holder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Ombud- sman Perwaki- lan
					Belum adanya pengawasan eksternal pengelolaan pengaduan di bidang investasi	Terwujudnya pengawasan eksternal pengelolaan pengaduan di bidang investasi	Jumlah petugas yang diawasi	1063	Terlaksananya pengawasan terhadap pimpinan pengaduan bidang investasi	Kegiatan	Jumlah pengawa- san pada pimpinan pelayanan pengaduan			532		532	Tidak terkait langsung dengan masyara- kat (stake- holder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Ombud- sman Perwaki- lan
							Jumlah unit yang diawasi	437	Terlaksananya pengawasan terhadap staf pengaduan bidang investasi	Kegiatan	Jumlah pengawa- san pada staf pengaduan			531		531	Tidak terkait langsung dengan masyara- kat (stake- holder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Ombud- sman Perwaki- lan
									Terlaksananya pengawasan terhadap waktu penyelesaian pengaduan	Jumlah unit	Jumlah unit dengan rata-rata waktu penyelesaian pengaduan 14 hari			437		437	Tidak terkait langsung dengan masyara- kat (stake- holder utama)	-	Keasis- tenan Utama Manaje- men Pencega- han Maladmi- nistrasi	Ombud- sman Perwaki- lan

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Peningkatan akses pengaduan masyarakat secara digital (pengaduan <i>online</i> Ombudsman RI) terkait <i>stunting</i>	Jumlah laporan masyarakat terkait <i>stunting</i> secara digital	34 Jumlah laporan masyarakat	Kurangnya akses pengaduan masyarakat terkait penanganan <i>stunting</i> melalui kanal <i>online</i>	Peningkatan akses pengaduan masyarakat terkait penanganan <i>stunting</i> melalui kanal <i>online</i>	Jumlah konten sosialisasi akses pengaduan masyarakat terkait <i>stunting</i> pada <i>website</i> dan media <i>online</i>	39 Konten	Terlaksananya sosialisasi mengenai pengaduan dan konsultasi terkait penanganan <i>stunting</i> pada <i>website</i>	Konten	Jumlah konten sosialisasi pada <i>website</i>				1	1	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat dan Keasistenan Utama VI
									Terlaksananya sosialisasi mengenai pengaduan dan konsultasi terkait penanganan <i>stunting</i> pada media sosial Ombudsman Pusat	Konten	Jumlah konten sosialisasi pada media sosial Ombudsman Pusat				4	4	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat dan Keasistenan Utama VI
									Terlaksananya sosialisasi mengenai pengaduan dan konsultasi terkait penanganan <i>stunting</i> pada media sosial Ombudsman Perwakilan	Konten	Jumlah konten sosialisasi pada media sosial Ombudsman Perwakilan				34	34	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Ombudsman Perwakilan
					Kurangnya jumlah konsultasi terkait penanganan <i>stunting</i> melalui kanal daring	Meningkatnya jumlah konsultasi terkait penanganan <i>stunting</i> melalui kanal daring	Jumlah konsultasi	34	Tersedianya petugas konsultasi yang memiliki kompetensi terkait penanganan <i>stunting</i> di Ombudsman Pusat	Jumlah	Jumlah Asisten penerima laporan	7	1	1	1	10	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Tersedianya petugas konsultasi yang memiliki kompetensi terkait penanganan <i>stunting</i> di Ombudsman Perwakilan	Jumlah	Jumlah Asisten penerima laporan	1		1		2	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Ombud-sman Perwakilan	Ombud-sman Perwakilan
									Tersedianya jadwal pelaksanaan konsultasi secara periodik terkait penanganan <i>stunting</i> di Ombudsman Pusat dan Perwakilan	Doku-men	Dokumen jadwal konsultasi terkait <i>stunting</i>			1	1	2	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masyarakat	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masyarakat dan Ombud-sman Perwakilan
									Tersedianya mekanisme dan prosedur konsultasi	Doku-men	Dokumen Juknis Tata Laksana Penerimaan Laporan	1				1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masyarakat	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masyarakat
					Kurangnya laporan masyarakat terkait penanganan <i>stunting</i> melalui kanal daring	Meningkatnya laporan masyarakat terkait penanganan <i>stunting</i> melalui kanal daring	Jumlah laporan masyarakat	34	Tersedianya petugas penerima pengaduan yang memiliki kompetensi terkait penanganan <i>stunting</i> di Ombudsman Pusat	Jumlah	Jumlah Asisten penerima laporan	7	1	1	1	10	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masyarakat	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masyarakat

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Tersedianya petugas penerima pengaduan yang memiliki kompetensi terkait penanganan <i>stunting</i> di Ombudsman Perwakilan	Jumlah	Jumlah Asisten penerima laporan	1		1		2	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Ombud-sman Perwakilan	Ombud-sman Perwakilan
									Terlaksananya pengelolaan data pengaduan masyarakat terkait penanganan <i>stunting</i>	Doku-men	Data Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL)			1	1	2	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masya-rakat	Keasiste-nan Utama Penga-duan Masya-rakat
					Belum adanya narahubung atau <i>focal point</i> instansi terkait penanganan <i>stunting</i>	Terbentuknya narahubung atau <i>focal point</i> instansi terkait penanganan <i>stunting</i>	Jumlah narahu-bung	25	Tersusunnya <i>database</i> narahubung instansi penanganan <i>stunting</i> di tingkat Pusat	Jumlah	Jumlah narahu-bung tingkat instansi Pusat (Kemenkes, TP2K, Kemensos, BPJS Kesehatan, dan BKKBN)		1	2	2	5	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasiste-nan Utama VI	Keasiste-nan Utama VI
									Tersusunnya <i>database</i> narahubung instansi penanganan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi	Jumlah	Jumlah narahu-bung tingkat Provinsi (Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial)		4	3	3	10	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasiste-nan Utama VI	Keasiste-nan Utama VI

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Tersusunnya <i>database</i> narahubung instansi penanganan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah	Jumlah narahubung tingkat Kabupaten/ Kota (Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial)		4	3	3	10	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasistenan Utama VI	Keasistenan Utama VI
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Ombudsman RI	Persentase penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Ombudsman RI	95.5% (Sistem Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Belum terpenuhinya jumlah pengelola pengadaan barang dan jasa yang kompeten	Meningkatnya pengelola pengadaan barang dan jasa yang kompeten	Tingkat keterisian jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa	2	Terlaksananya sertifikasi kepada pegawai unit kerja pengadaan barang dan jasa yang sudah diberikan pelatihan	Dokumen	Tersusunnya dokumen analisis		1	1		2	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Unit Kerja pengadaan barang dan jasa
					Masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha yang terlibat pengadaan barang/jasa di lingkungan Ombudsman RI terkait <i>E-tendering</i> , <i>E-purchasing</i> , dll	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait <i>E-tendering</i> , <i>E-purchasing</i> , dll	Jumlah kegiatan	3	Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal	1	1	1		3	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Unit Kerja pengadaan barang dan jasa
					Masih terbatasnya jumlah ketersediaan produk/barang dalam negeri yang sesuai kebutuhan	Tersedianya produk/barang dalam negeri yang sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada proses pengadaan	90%	Terlaksananya <i>business matching</i> antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan pelaku usaha	Kegiatan	Jumlah kegiatan <i>business matching</i> dengan pelaku usaha			1		1	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Unit Kerja pengadaan barang dan jasa

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Terlaksananya pencatatan realisasi pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Doku- men	Laporan Monitoring dan Evaluasi Harga dan Aktifitas pada <i>E-katalog</i>			1		1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Unit Kerja pengadaan barang dan jasa
5	Pengendalian Inflasi	Pengawasan penyaluran bantuan pangan (beras) Pemerintah	Jumlah kegiatan monitoring dan koordinasi penyaluran bantuan pangan	4 kegiatan	Belum dilakukannya perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan	Terwujudnya perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan	Saran perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nasional	1	Melakukan pemantauan lapangan Pemerintah Desa dan masyarakat guna pengecekan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan	Lokasi	Jumlah lokasi titik pantau		2	2	2	5	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
									Melakukan klarifikasi kepada para pemangku kepentingan di daerah terkait temuan hasil pengecekan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksana- an klarifikasi		2	2	1	5	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
									Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Pusat dalam rangka perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksana- an koordinasi		1	1	1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan <i>(bottleneck)</i>	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
					Belum terjaminnya kualitas bantuan pangan (beras) layak konsumsi sesuai standar	Terjaminnya kualitas bantuan pangan (beras) layak konsumsi sesuai standar	Saran perbaikan dalam memastikan kualitas bantuan pangan	5	Melakukan pemantauan lapangan ke titik penyaluran dan masyarakat guna pengecekan kualitas bantuan pangan	Lokasi	Jumlah lokasi titik pantau		2	2	1	5	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
									Melakukan pengecekan ke gudang Perum Bulog dan atau klarifikasi kepada Pimpinan Cabang/Pimpinan Wilayah Perum Bulog terkait temuan hasil pengecekan kualitas bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan klarifikasi		2		1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
									Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Pusat dalam rangka perbaikan kualitas bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi		1	1	1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
					Belum terwujudnya implementasi mekanisme penyaluran bantuan pangan sesuai prosedur	Terwujudnya implementasi mekanisme penyaluran bantuan pangan sesuai prosedur	Saran perbaikan Standar Operasional Posedur (SOP)	1	Melakukan pemantauan lapangan ke titik penyaluran dan masyarakat guna pengecekan	Lokasi	Jumlah lokasi titik pantau		2	2	1	5	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									proses penyaluran bantuan pangan sesuai prosedur											
									Melakukan klarifikasi kepada transporter (PT.Pos, PT.JPL, dll) dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Wilayah Perum Bulog terkait temuan hasil pengecekan proses penyaluran bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan klarifikasi		2		1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
									Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Pusat dalam rangka perbaikan mekanisme penyaluran bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi		1	1	1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
					Belum terjaminnya ketersediaan pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk program bantuan pangan	Terjaminnya ketersediaan pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk program bantuan pangan	Saran perbaikan dalam penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	1	Melakukan pemantauan lapangan ke gudang Perum Bulog guna pengecekan ketersediaan stok/pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan	Lokasi	Jumlah lokasi titik pantau		2		1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan (<i>bottleneck</i>)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Melakukan klarifikasi kepada Pimpinan Cabang/Pimpinan Wilayah Perum Bulog terkait temuan hasil pengecekan ketersediaan stok/pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan klarifikasi		2		1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
									Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Pusat dalam rangka monitoring ketersediaan stok/pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi		1	1	1	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III
					Belum terwujudnya tata kelola pengaduan masyarakat yang efektif terkait program bantuan pangan	Terwujudnya tata kelola pengaduan masyarakat yang efektif terkait program bantuan pangan	Saran perbaikan terhadap tata kelola pengaduan masyarakat yang efektif terkait program bantuan pangan	1	Melakukan pemantauan lapangan ke titik penyaluran dan masyarakat guna pengecekan ketersediaan layanan pengaduan dalam program bantuan pangan	Lokasi	Jumlah titik lokasi pantau		2	2	1	5	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis- tenan Utama III	Keasis- tenan Utama III

No	Tema	Sasaran Tematik <i>Road Map</i>	Indikator	Target	Permasalahan <i>(bottleneck)</i>	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)	Unit Kerja	
										Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koor dinator	Pelak sana
									Melakukan klarifikasi kepada para pemangku kepentingan di daerah terkait temuan hasil pengecekan layanan pengaduan dalam program bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan klarifikasi		2	2	1	5	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama III	Keasis-tenan Utama III
									Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Pusat dalam rangka perbaikan layanan pengaduan dalam program bantuan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi		1	1	1	3	Terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	-	Keasis-tenan Utama III	Keasis-tenan Utama III